

# **Peran Uni Afrika dalam Penyelesaian Konflik Darfur di Sudan (2004-2007)**

**Ersa Aulia Mayori**

[chasyaa27@gmail.com](mailto:chasyaa27@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Sidik Jatmika, M.Si.**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

## ***Abstract***

*This study is aimed to explain how the role of the African Union in the resolution of the Darfur conflict in Sudan (2004-2007). The Darfur conflict is an ethnic conflict that occurred in 1983, when the Sudanese government gave full support to the ethnic Arabs so that ethnic Africans felt discriminated against by it. In the end in 2002 ethnic Africans chose to join Sudan Liberation Movement / Army and also the Justice and Equality Movement. In early 2003 the war began to intensify during which the Sudan Liberation Movement / Army carried out attacks on the Sudanese military group called "Janjaweed". The African Union which is an International Organization in the African region finally sent their troops and called the African Union Mission in Sudan to carry out peace missions and resolve the conflict. But the efforts of the African Union failed. In the end, the African Union requested assistance from the United Nations in resolving the conflict in Darfur.*

***Keywords : African Union, Janjaweed, SLM/A, JEM, AMIS***

## **Pendahuluan**

Uni Afrika atau *African Union* (AU) merupakan organisasi Internasional yang berdiri pada Juli 2002 dan mewakili beberapa negara di benua Afrika. Organisasi ini merupakan penerus dari *Organization of African Unity* (OAU) yang telah didirikan lebih dulu pada tahun 1963 dan memiliki beberapa tujuan utama yang telah ditetapkan dalam piagam OAU diantaranya yaitu untuk meningkatkan solidaritas serta persatuan negara-negara Afrika, menyelaraskan serta mengintensifkan kerjasama dan juga mengupayakan rakyat Afrika agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, membangun dan memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota, memberantas *apartheid*, kolonialisme, dan ketergantungan pada pihak asing.

Menurut Sidik Jatmika dalam bukunya yang berjudul “*Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*” mendefinisikan tentang beberapa pandangan yang terjadi ketika *Organization of African Union (OAU)* didirikan. Pada saat *Organization of African Union (OAU)* didirikan, muncul berbagai pandangan terkait pendirian organisasi ini. Pandangan tersebut tentang para anggota yang menginginkan adanya pemusatan suatu badan yang memiliki sifat otoritas untuk mengatur seluruh negara anggota dan para anggota juga menginginkan adanya kerjasama multilateral yang langsung berada dibawah pimpinan seluruh anggota *Organization of African Union (OAU)*. (Jatmika, 2016).

Darfur merupakan salah satu daerah yang berada di Sudan bagian barat yang memiliki etnis dalam jumlah yang banyak serta memiliki penduduk sebesar 6 juta jiwa. Konflik Darfur menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Sudan. Isu besar yang terjadi yakni terkait dengan kemanusiaan yang akar permasalahannya muncul dari adanya marginalisasi ekonomi terhadap akses sumber daya tanah, air, politik (lebih condong kepada milisi Arab). Hal tersebut yang pada akhirnya

menyebabkan munculnya dua kelompok pemberontak terhadap Pemerintahan Sudan. (Collins, 2005).

Hal utama yang menjadi pemicu dari Konflik Darfur ini ialah dimana ketika *Janjaweed* (tentara milisi Sudan) yang berasal dari Arab dipersenjatai serta dilatih oleh Pemerintah Sudan guna untuk mengamankan daerah konflik di Darfur. Pemberian kekuasaan penuh tersebut yang akhirnya menyebabkan milisi dari Etnik Afrika merasa terabaikan dan mereka memilih untuk bergabung dengan *Darfur Liberation Movement* (DLF) atau biasa disebut dengan Front Pembebasan Darfur yang sebelumnya Front tersebut telah mendapatkan pelatihan dari militer Sudan dan Chad. (Adnan, 2005).

Konflik ini terus berlanjut hingga tahun 2003 dimana pada saat itu *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) mendeklarasikan penyerangan terhadap militer Pemerintah Sudan. Setelah pendeklarasian tersebut memuncaklah konflik yang terjadi antara *Janjaweed* (militer milik Pemerintah Sudan) dan kelompok pemberontak yaitu SLM/A serta JEM. Dengan semakin meluasnya konflik Darfur ini serta dunia internasional yang terus memberikan tekanan, banyak dari pihak luar yang melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik ini. Pada akhirnya PBB juga mengeluarkan Resolusi PBB No. 1564 yang berisi pemberian mandat kepada Uni Afrika untuk melakukan misi kemanusiaan dan resolusi konflik di Darfur. (Ekengard, 2008).

Konflik tersebut sebenarnya sudah ingin diselesaikan pada tahun 2004 ketika pada saat itu bertepatan dengan dibentuknya *The Comprehensive Peace Agreement* (PCA) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak berhasil mewujudkan perdamaian di kedua belah pihak karena konflik tersebut semakin memanas dan telah terjadi dalam beberapa dekade. Hal tersebut membuat Uni Afrika atau *African Union* (AU) yang merupakan organisasi yang menaungi beberapa negara di Afrika meminta bantuan kepada PBB yang pada

akhirnya PBB merespon dengan baik keinginan Uni Afrika tersebut.

PBB juga turut serta membantu Uni Afrika dalam penyelesaian Konflik Darfur yang dibahas dalam KTT khusus penyelesaian konflik regional pada 31 Juli 2007. Dalam KTT ini, dewan keamanan PBB memutuskan untuk menjalankan resolusi PBB No. 1769 yang berisi tentang pembentukan pasukan keamanan gabungan antara Uni Afrika, keamanan PBB dan juga *The African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang bernama *United Nation African Mission in Darfur* (UNMAID). Pasukan keamanan gabungan tersebut dibuat demi tercapainya perdamaian melalui kekuatan militer bersenjata.

### **Kerangka Pemikiran**

Untuk mendeskripsikan bagaimana peran Uni Afrika dalam penyelesaian Konflik Darfur di Sudan tahun 2004-2007, penulis mencoba untuk menerapkan teori maupun konsep yang ada di dalam Ilmu Hubungan Internasional. Konsep yang digunakan yaitu Konsep Organisasi Internasional.

Organisasi internasional menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. (Bennet, 1995).

Secara umum, ada delapan fungsi Organisasi Internasional bagi para anggotanya. Menurut Bennet (1995) berikut ini adalah beberapa fungsi dari organisasi ini:

1) Artikulasi dan Agregasi yaitu *International Organization* memiliki fungsi sebagai instrumen bagi suatu

negara untuk proses agregasi dan artikulasi kepentingannya. Organisasi Internasional menjadi suatu wadah forum diskusi dan negosiasi antar negara anggota dalam sistem internasional.

2) Norma yaitu *International Organization* merupakan aktor, forum, dan instrumen yang memiliki peran penting dalam kegiatan normatif dari sistem politik internasional. Misalnya, membuat dan menetapkan berbagai nilai dan prinsip non-diskriminasi. 3) Rekrutmen yaitu *International Organization* memiliki peranan penting dalam merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4) Sosialisasi yaitu dalam hal ini sosialisasi adalah upaya untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem secara sistematis. Proses ini berkontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama antar negara. 5) Pembuat Peraturan yaitu sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia. Sehingga dalam pembuatan keputusan internasional umumnya mengacu pada tindakan masa lalu, perjanjian ad hoc, oleh Organisasi Internasional. 6) Pengesahan Peraturan yaitu *International Organization* memiliki tugas penting dalam mengesahkan berbagai aturan di dalam sistem internasional. Dalam hal ini, lembaga kehakiman memiliki fungsi adjudikasi meskipun tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai. 7) Informasi yaitu Organisasi antar negara juga memiliki fungsi dan peranan dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. 8) Operasional yaitu *International Organization* melaksanakan sejumlah fungsi operasional di berbagai bidang. Misalnya World Bank (pendanaan), UNICEF (perlindungan anak), UNHCR (membantu pengungsi), dan lain-lain.

Menurut Situmorang, eksplorasi dan analisis aktivitas Organisasi Internasional akan menampilkan beberapa perannya diantaranya sebagai mediator dan rekonsiliator. Pengertian dari mediator yaitu aktor yang menjadi pihak ketiga, baik itu organisasi internasional maupun negara yang

ikut serta dalam negosiasi yang berlangsung diantara pihak yang sedang bersengketa. Sedangkan pengertian dari rekonsiliator yakni pihak atau organ yang dibentuk melalui kesepakatan dari pihak yang sedang bersengketa maupun yang telah ada sebelumnya dalam melakukan resolusi konflik. (Situmorang, 1999).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas oleh penulis, ada dua fungsi yang tepat untuk digunakan menganalisis konflik Darfur di Sudan tahun 2004-2007. Fungsi yang pertama yaitu sebagai fasilitator perundingan damai. Fungsi yang kedua sebagai mediator dalam perundingan damai. Fungsi yang ketiga yakni sebagai rekonsiliator dalam proses kesepakatan gencatan senjata guna mencapai suatu perdamaian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dinamika Uni Afrika Sebagai Organisasi Administrasi Internasional**

Pada tahun 1880-an di Kerajaan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama Rhodesia atau Zimbabwe berdatangan para pemukim dari ras kulit putih. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris mengakibatkan lemahnya sistem pemerintahan di Afrika dan juga menjadikan Afrika negara yang tidak mandiri. Selanjutnya pada Mei 1963, *Organization of African Union* (OAU) atau Organisasi Persatuan Afrika yang beranggotakan 32 negara independen Afrika berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia untuk mendiskusikan tentang legitimasi untuk seluruh wilayah yang ada di Afrika bahwasanya orang dari ras kulit putih tidak dapat lagi melakukan penjajahan ataupun memperbudak orang Afrika. (Kwadwo, 2006).

Pada tahun 1963, beberapa negara di Afrika dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Brazzaville*, *Monrovia*, dan *Casablanca*. Pemerintahan *Apartheid* yang ada di Afrika

menimbulkan perdebatan panjang tentang perbedaan yang terjadi antara penduduk dengan ras kulit putih dan juga penduduk dengan ras kulit hitam. Melihat perkembangan dunia yang semakin pesat, maka dapat dilihat bahwasanya prinsip maupun tujuan yang dimiliki oleh OAU dirasa masih belum mampu untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Afrika.

Pada akhirnya, *Organization of African Unity* dinilai masih belum bisa menyatukan Afrika menjadi satu kesatuan dan juga tidak dapat mencapai Masyarakat Ekonomi Afrika, sehingga pada 2001 diubahlah OAU menjadi suatu organisasi baru yaitu Uni Afrika atau *African Union* (AU).

**Gambar 1. Peta Benua Afrika**



(Sumber: <https://gres.web.id/peta-benua-afrika/>)

Pada tahun 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, sejumlah 32 negara Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya pada waktu itu sepakat untuk membentuk Organisasi Persatuan Afrika atau *Organization of African Unity* (OAU). Selanjutnya ada 22 negara yang bergabung secara bertahap sehingga Uni Afrika memiliki total anggota sebanyak 53 negara pada saat pengantian dari OAU menjadi *African Union* (AU) pada tahun

2002. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2011, Sudan Selatan resmi masuk menjadi anggota Uni Afrika yang ke-55.

Dari keseluruhan negara yang menjadi anggota dari *African Union*, ada beberapa dari negara anggota di atas yang dibekukan dari keanggotaan Uni Afrika dikarenakan alasan tertentu diantaranya, yaitu:

- Madagaskar yang dibekukan setelah terjadi krisis politik Madagaskar pada tahun 2009

- Guinea-Bissau yang dibekukan setelah adanya kudeta Guinea-Bissau pada tahun 2012

- Republik Afrika Tengah yang dibekukan setelah adanya Konflik Republik Afrika Tengah pada tahun 2012-2013

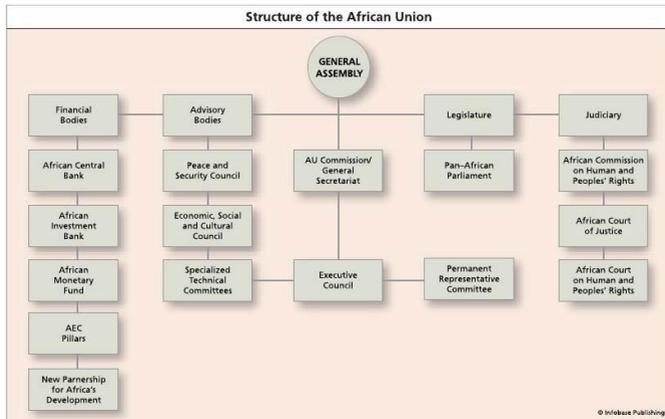
- Mesir yang dibekukan setelah adanya kudeta Mesir pada tahun 2013

Pembekuan anggota yang dilakukan oleh Uni Afrika merupakan salah satu prosedur yang biasa dilakukan oleh setiap organisasi internasional sehingga hal tersebut lah yang juga dilakukan oleh Uni Afrika terhadap beberapa negara anggotanya yang melanggar nilai-nilai fundamental Uni Afrika.

Struktur organisasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu susunan yang terdapat dalam hubungan antar tiap bagian dan juga posisi yang ada dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi juga menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana pembagian serta pemisahan beberapa kegiatan pekerjaan yang ada antara lembaga organisasi satu dengan lembaga organisasi lainnya dan juga bagaimana keterkaitan antara hubungan aktifitas disetiap lembaga dan juga pembatasan fungsi yang ada di setiap lembaga supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pembagian tugas dan fungsi. Selain itu pengertian lain dari struktur organisasi adalah

sebuah alat yang berfungsi untuk membantu mengatur organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, Uni Afrika memiliki beberapa lembaga diantaranya yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2. Struktur Organisasi Uni Afrika**



(Sumber: <http://digilib.unila.ac.id/12997/15/BAB%20II.pdf>)

Pengertian dari kata demokrasi sangatlah luas dan bervariasi, namun umumnya pengertian dari demokrasi merupakan suatu sistem politik yang mempunyai beberapa keunggulan utama diantaranya yaitu bebas melakukan kompetensi di antara partai-partai politik, dapat mengadakan pemilu secara periodik serta sangat menghormati kebebasan fundamental dalam berpikir, berekspresi dan berkumpul. Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip berdasarkan *The Charter on Democracy* (Piagam Demokrasi), prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah : menghormati hak asasi manusia (HAM); transparan dan juga bebas dalam pemilihan yang adil; adanya pemisahan kekuasaan; menjadi pemerintah yang representatif; partisipasi rakyat; adanya transfer konstitusional

dari kekuatan politik; pembangunan yang berkelanjutan; perdamaian dan keamanan manusia.

Hal ini lah yang menghubungkan antara Demokrasi dan juga Hak Asasi Manusia dalam Negara-negara yang ada Afrika untuk tetap menggunakan demokrasi disamping sudah adanya aturan hukum dan HAM. Langkah yang telah dilakukan oleh Uni Afrika dalam mengaplikasikan demokrasi dalam pemerintahan negara mereka dapat dikatakan berhasil karena berdasarkan fakta yang ada bahwa bentuk dari pemerintahan Afrika telah menggunakan demokrasi dalam berbagai kesempatan. (Diedre, 2008).

### **Dinamika Konflik di Darfur**

Darfur merupakan salah satu daerah di Afrika yang terletak di Republik Sudan bagian Barat. Darfur sendiri memiliki arti “Tanah orang Fur” (dalam bahasa Arab). Pada zaman dahulu Darfur merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Darfur juga menjadi salah satu negara yang kuat dengan adanya etnis Afrika dibawah kerajaan Kordofan pada masa kejayaannya di abad ke-17.

Namun memasuki tahun 1875, kerajaan mengalami penurunan dikarenakan adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Mesir. (George, 1992). Selama dunia sedang mengalami situasi yang sangat tidak kondusif terutama pada saat terjadi Perang Dunia I tepatnya pada tahun 1916, Inggris mulai melakukan langkah invasi terhadap Darfur yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan Darfur mendapatkan serangan dari Mesir dan juga Sudan. (Samuel, 2006).

Darfur atau yang dikenal dengan sebutan tanah orang Fur adalah salah satu wilayah yang tepatnya terletak di Sudan bagian Barat dimana Darfur ini berbatasan langsung dengan Afrika Tengah, Chad, dan juga Libya. Darfur merupakan negara yang memiliki luas wilayah hanya kurang lebih seperlima dari luas wilayah Sudan.

Berdasarkan kondisi geografisnya, Darfur memiliki empat tipikal wilayah. Yang pertama yaitu daerah Darfur di bagian timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan juga perbukitan berpasir yang biasa disebut dengan nama *goz*. Selanjutnya karakter yang kedua adalah *wadi* yang mana ini merupakan sungai musiman. Yang ketiga yaitu berada di daerah Darfur bagian barat dimana sebagian besar wilayahnya berupa batuan dasar yang tertutup lapisan tanah berpasir yang tipis sehingga sangat cocok untuk beternak. Karakter yang ke empat merupakan kawasan yang lebih subur dibandingkan kawasan lainnya. Kawasan ini biasa disebut dengan nama *Pegunungan Marra* yang mana di kawasan ini terdapat curah hujan yang cukup tinggi dan juga memiliki banyak cadangan minyak. (Adnan, 2006).

Populasi penduduk yang ada di Darfur berada pada angka 6 juta jiwa. Seperti yang telah diketahui bahwasanya Darfur memiliki dua etnis yang mendominasi yaitu etnis Afrika dan juga Arab. Darfur merupakan salah satu wilayah di Sudan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya seperti uranium, gas dan juga minyak.

Pada masa pemerintahan Sadiq Al Mahdi tepatnya pada tahun 1986, pemerintah Sudan mengusulkan untuk diadakannya pemecahan Darfur menjadi tiga wilayah. Tetapi pada kenyataannya ketika pada masa pemerintahan presiden

Omar Hassan Al Bashir (tahun 1994) ) kebijakan ini baru dapat terealisasi. Darfur dipecah menjadi tiga wilayah yakni Darfur Barat (*Gharb Darfur*) yang memiliki ibukota Geneina, Darfur Utara (*Syamal Darfur*) yang memiliki ibukota Al Fasher, dan yang terakhir adalah Darfur Selatan (*Janub Darfur*) yang memiliki ibukota Nyala.

Gambar 3. Peta Wilayah Darfur.



(Sumber: J. Flint and Alex de Waal in *Darfur: a new history of a long war bobok*)

Pada tahun 1956 yang mana itu merupakan tahun dimana Sudan memperoleh kemerdekaannya. Sejak saat itu konflik di Sudan khususnya Darfur sudah sering kali terjadi. Memasuki pertengahan tahun 1987 terjadilah perang antar suku. Dimana suku yang terlibat adalah suku Fur dengan suku Arab. Kelompok pemberontak (*Darfur Liberation Front*) yang nantinya akan menjadi titik awal munculnya pemberontak yang ada di wilayah Darfur sekitar tahun 1980-an. kelompok tersebut pada akhirnya melakukan penyerangan ke markas milik pemerintah yang berada di Golo, Jabal Marra pada tanggal 26 Februari 2003.

Satu bulan berselang setelah pemberontakan pertama yaitu pada 25 Maret 2003 gabungan dari kedua kelompok

pemberontak tersebut berhasil merebut markas militer milik pemerintah Sudan yang berada di kota Tine tepatnya berada di daerah perbatasan Sudan dengan Chad. Satu bulan berikutnya tepatnya pada April 2003 kelompok ini kembali melakukan penyerangan, namun penyerangan kali ini mengarah ke bandar udara El Fasher yang merupakan ibukota dari Darfur Utara.

Konflik yang sedang terjadi di Darfur ini bermula dari adanya perebutan lahan ternak dan juga sumber air yang ada di Darfur. Dalam hal ini pemerintah Darfur sendiri juga lebih mengutamakan masyarakat yang berasal dari etnis Afrika Arab. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya kecemburuan sosial serta ketidakpuasan dari masyarakat etnis Afrika Hitam terhadap pemerintah. (Adnan, 2006). Dikarenakan adanya hal tersebut yang akhirnya memunculkan dua gerakan politik yaitu yang pertama adalah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan atau yang biasa disebut dengan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang berada dibawah pimpinan Abdul Wahid Mohammed al-Nur dan yang kedua adalah Gerakan Pembebasan Sudan atau yang biasa disebut dengan *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) yang berada dibawah pimpinan Shadiq AL-Mahdi.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik Darfur ini sangatlah beraneka ragam diantaranya adalah banyaknya kasus kelaparan, kemiskinan, instabilitas politik, pengungsian dan juga ancaman keamanan internasional yang mengancam stabilitas regional Darfur itu sendiri. Tidak hanya itu saja dampak yang terjadi akibat konflik tersebut yakni banyaknya masyarakat sipil maupun para militer yang kehilangan rumah dan anggota keluarganya akibat adanya beberapa aksi seperti penghancuran, penjarahan, perampokan, pemerkosaan, penculikan bahkan aksi pembunuhan terhadap warga sipil.

Selain itu masih ada kerugian yang harus ditanggung oleh Sudan akibat dari konflik ini yaitu berupa kerugian dimana pada tahun 2007 pemerintah Sudan harus mengirimkan pasukan PBB dan juga Uni Afrika ke daerah yang sedang mengalami konflik yang mana itu memakan dana sebesar 2 miliar US\$.

### **Peran Uni Afrika dalam Penyelesaian Konflik Darfur di Sudan**

Konflik di Darfur yang berawal dari konflik bernuansa etnis akhirnya semakin meluas dan juga mendapat banyak sorotan dari dunia internasional. (Adnan, 2006). Dampak yang terjadi akibat konflik tersebut yakni banyaknya masyarakat sipil maupun para militer yang kehilangan rumah dan anggota keluarganya akibat adanya beberapa aksi seperti penghancuran, penjarahan, perampokan, pemerkosaan, penculikan bahkan aksi pembunuhan terhadap warga sipil.

Demi terwujudnya sebuah penyelesaian dari konflik Darfur ini, Uni Afrika yang notabene nya merupakan sebuah Organisasi Internasional merasa tergerak untuk terjun langsung dalam misi penyelesaian konflik-konflik yang sedang terjadi di negara anggota.

Dalam misi penyelesaian konflik Darfur ini Uni Afrika telah melakukan beberapa upaya agar konflik ini dapat terselesaikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Afrika diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Uni Afrika berperan sebagai fasilitator perundingan damai, (2) Uni Afrika berperan sebagai mediator perundingan damai, (3) Uni Afrika berperan sebagai rekonsiliator kesepakatan gencatan senjata.

## **A. Uni Afrika Berperan Sebagai Fasilitator Perundingan Damai**

Dalam sebuah upaya penyelesaian suatu konflik harus ada satu pihak yang nantinya akan menjadi fasilitator. Sebelum menjalankan tugas tersebut, Uni Afrika lebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden Iddris Deby yang mana pada saat itu merupakan Presiden dari Negara Chad. (Slim, 2004). Pada 5 Maret 2004 Duta Besar Baba Gana Kingibe melakukan kunjungan ke negara Chad untuk mengadakan beberapa pertemuan secara langsung dengan para petinggi pemerintahan Chad. Setelah kunjungannya yang pertama, Duta Besar Baba Gana Kingibe melanjutkan untuk melakukan kunjungan yang kedua yaitu pada 10 Maret 2003 ke Sudan.

Kunjungan yang dilakukan oleh Baba Gana Kingibe ke dua negara yaitu Chad dan juga Sudan membuahkan hasil yang mana pada akhirnya Dewan Keamanan Uni Afrika mengutus Direktur Dewan Keamanan Uni Afrika dan juga tim nya yang mana pada saat itu dipimpin Sam Ibok untuk berkunjung ke N'djamena, Chad. Dalam pertemuan ini pemerintah Sudan tidak ikut serta untuk hadir dikarenakan bahwa menurut pemerintah Sudan, permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di Darfur ini merupakan konflik internal yang tidak membutuhkan campur tangan dari pihak lain selain Uni Afrika.

## **B. Uni Afrika Berperan Sebagai Mediator dalam Perundingan Damai**

Selain berperan sebagai fasilitator dalam perundingan damai, Uni Afrika juga memiliki andil yang cukup besar dalam upaya penyelesaian konflik di Darfur ini yakni bertindak sebagai mediator atau aktor pihak ketiga diantara

kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik. Setelah upaya perundingan damai yang dilakukan oleh Uni Afrika pada tanggal 6 April 2004 dirasa masih belum efektif maka Uni Afrika kembali mencoba melakukan upaya dengan cara mediasi yang ditujukan kepada kedua belah pihak yang terlibat konflik dan berada dibawah naungan Presiden Iddris Deby.

Penandatanganan perjanjian gencatan senjata juga yang pada akhirnya memberikan landasan hukum bagi Uni Afrika supaya dapat lebih berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Darfur tersebut. Sementara itu, muncul beraneka ragam tuntutan yang berbeda-beda dari pemerintah Sudan serta kedua kelompok pemberontak tersebut terkait dengan perundingan damai ini. Dalam hal ini dimana Uni Afrika yang menjadi pihak ketiga (mediator) dalam perundingan damai yang terjadi di Darfur harus melakukan pendekatan persuasif kepada kedua belah pihak yang terlibat konflik.

### **C. Uni Afrika Berperan sebagai Rekonsiliator Kesepakatan Gencatan Senjata**

Dalam upaya penyelesaian konflik di Darfur Uni Afrika memiliki peran yang sangat penting karena sebagai Organisasi Internasional, Uni Afrika harus mampu menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di negara anggotanya termasuk Darfur. Pada 28 Mei 2004 tepatnya di kota Addis Ababa, Ethiopia lah *Joint Commission* (JC) dan juga *Ceasefire Commission* (CFC) dibentuk.

Meskipun *Ceasefire Commission* (CFC) ini telah dibentuk pada 28 Mei 2004, namun *Ceasefire Commission* (CFC) baru mulai resmi beroperasi pada 19 Juni 2004 bertepatan dengan penunjukan Brigadir Jendral Festus

Okunwo yang berasal dari Nigeria untuk menjadi ketua dari *Ceasefire Commission* (CFC). Selain itu, Dewan Keamanan Uni Afrika juga mendirikan kantor pusat *Ceasefire Commission* (CFC) yang berada di kota El-Fashir yang merupakan ibu kota dari Darfur Utara.

Ketika awal *Ceasefire Commission* (CFC) ini berdiri, ada program utama yang dimiliki yaitu bertindak sebagai pengawas. Oleh karena itu, muncul *African Union Monitoring Mission* yang juga merupakan salah satu badan operasi pelaksana milik *Ceasefire Commission* (CFC). Monitoring yang dilakukan oleh *African Union Mission in Sudan* (AMIS) lebih terfokus pada pengawasan terkait gencatan senjata dan juga aksi kemanusiaan selama konflik di Darfur terjadi.

Selama perjanjian gencatan senjata atau *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCFA) berlangsung yakni pada 8 April 2004, masih sangat banyak terjadi tindakan yang merugikan warga sipil seperti adanya pengusiran yang dilakukan secara paksa dan juga beberapa penyerangan. Oleh karena adanya pernyataan tersebut akhirnya mendorong Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk lebih meningkatkan lagi kekuatan dari AMIS (*African Union Mission in Sudan*) demi meningkatkan keamanan di Darfur.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini telah dipaparkan bagaimana fungsi dan juga peran dari ketika menyelesaikan konflik-konflik yang sedang terjadi di beberapa negara anggotanya. Namun ternyata tidak semua fungsi dan juga peran dari organisasi internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Skripsi ini telah menjelaskan

tentang bagaimana upaya Uni Afrika dalam penyelesaian konflik Darfur di Sudan (2004-2007).

Konflik yang pada awalnya hanya berupa pertikaian antar etnis ini semakin berkembang hingga munculnya konflik Darfur pada tahun 2003 yang disebabkan oleh adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan di Khartoum dan juga tidak adanya pemerataan pembangunan di Darfur.

Konflik Darfur ini semakin memuncak manakala pemerintah Sudan melakukan diskriminasi dengan cara mempersenjatai milisi dari Arab yang bernama *Janjaweed* dengan tujuan untuk melakukan penyerangan balik terhadap kedua pemberontak tersebut. Setelah melihat banyak dampak yang ditimbulkan oleh konflik ini mendorong masyarakat internasional untuk terjun langsung dengan tujuan untuk membantu proses penyelesaian konflik Darfur ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di wilayah Darfur adalah menjadi fasilitator dalam perundingan damai yang berlangsung antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, menjadi mediator dalam perundingan damai tersebut demi mencapai suatu penyelesaian dari konflik Darfur dan juga kesepakatan damai, menjadi rekonsiliator terhadap proses pencapaian perdamaian berupa pengawasan perjanjian gencatan senjata (*Humanitarian Ceasefire Agreement*) yang dilakukan oleh *Ceasefire Commission* (CFC).

Konflik tersebut sebenarnya sudah ingin diselesaikan pada tahun 2004 dengan berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh Uni Afrika. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tidak berhasil mewujudkan perdamaian di kedua belah pihak karena konflik tersebut semakin memanas dan telah terjadi

dalam beberapa dekade. Hal tersebut membuat Uni Afrika atau *African Union* (AU) yang merupakan organisasi yang menaungi beberapa negara di Afrika meminta bantuan kepada PBB yang pada akhirnya PBB merespon dengan baik keinginan Uni Afrika tersebut.

PBB juga turut serta membantu Uni Afrika dalam penyelesaian Konflik Darfur yang dibahas dalam KTT khusus penyelesaian konflik regional pada 31 Juli 2007. Dalam KTT ini, dewan keamanan PBB memutuskan untuk menjalankan resolusi PBB No. 1769 yang berisi tentang pembentukan pasukan keamanan gabungan antara Uni Afrika, keamanan PBB dan juga *The African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang bernama *United Nation African Mission in Darfur* (UNMAID). Pasukan keamanan gabungan tersebut dibuat demi tercapainya perdamaian melalui kekuatan militer bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adnan, Abdul Hadi. (2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung : CV. Angkasa.
- Adnan, Abdul Hadi. (2006). *Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis Darfur*. Jakarta.
- Bennet, A. Lerroy. (1979). *International Organization*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Bennet, A. Lerroy. (1995). *International Organization*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Charles Gurdon. *Instability and The State: Sudan*. London: Macmillan. 1989.
- David E, Long and Bernard Reich. *The Government and Politics of The Middle East and North Africa*. 5th Edition. Westview. Press. 2007.
- Diedre L. Badejo. *Global Organization: The African Union*, Chelsea House. New York. 2008.
- Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika* (hal. 158). Yogyakarta : Samudra Biru.
- Mauna Afrikana, Boer. (2005). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung : PT Alumni.
- Mas'oe'd, M. (2010). *Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta : LP3ES.

- Morgenthau, H. J. (2007). *Politic Among Nations : The Struggle for Power and Peace*. Micigan: A. A.Knopf.
- Rudi, Teuku May. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Samuel Totten and Eric Markusen. *Genocide in Darfur: Investigating The Atrocities In The Sudan*. Taylor & Francis Group. LCC. 2006.
- Situmorang. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

## **JURNAL**

- African Union. *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes*. Jurnal. 2013.
- Collins, Robert O. *Disaster in Darfur*, CA : Tashai Publisher. Hollywood. 2005.
- D.W. Bowett. *The Law of International Institution*. Steven and Son Ltd. London: Fourth Ed. 1982.
- Ekengard, Arvid. *The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lesson Learned*, dalam Swedish Defence Research Agency. 2008.
- George Lenczowski. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1992. Hlm.298.
- Human Right Watch. *Sudan Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan*. Vol.16 no.5 April 2004.

KwadwoKonadu, Agyemang and KwaminaPanford. *Africa's Development the Twenty-first Century - Transition From The Organization of African Unity to the African Union*". Aldershot and Burlington, VT: Ashgate, 2006.

## **LAPORAN RESMI**

African Union. "*Constructive act of the African Union*". Diakses dari situs : <http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/AUConstitutive-Act-of-the-African-Union.pdf>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.00 WIB.

African Union. "*History of African Union*". Diakses dari situs : <https://au.int/en/overview>. Pada 13 Maret 2019 pukul 23.04 WIB.

African Union. "*Report of The Chairperson of The Commission on The Station in the Sudan*". 13 April 2004 Diakses dari situs : <http://www.africa-union.org/DARFUR/>>. Pada 27 Mei 2019 pukul 23.04 WIB.

African Union Peace and Security Council. "*Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in the Sudan (Crisis in Darfur)*". African Union Peace and Security Council Fifth Session (PSC/PR/2(V). 2004. Diakses dari situs : <http://www.peaceau.org/uploads/reportsudan-5th.pdf>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.00 WIB.

United States Institute of Peace. *“Humanitarian Cease Fire Agreement on the Conflict Darfur”*. 2004. Diakses dari situs : [https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace\\_agreements/sudan\\_ceasefire\\_04082004.pdf](https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/sudan_ceasefire_04082004.pdf). Pada 10 Desember 2019 pukul 22.10 WIB.

## **WEBSITE**

African Union. *“Country Profiles”*. Diakses dari situs resmi AU : <https://www.au.int/en/countryprofiles>. Pada tanggal 17 September 2019 pukul 20.00 WIB.

African Union. *“The Commission”*. Diakses dari situs resmi AU : <https://www.au.int/web/en/organs/commission>. Pada tanggal 15 November 2019 pukul 23.26 WIB.

African Union. *“The Economic, Social and Cultural Council”*. Diakses dari situs resmi AU : <https://www.au.int/web/en/organs/ecosocc>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

African Union. *“The Peace and Security Council”*. Diakses dari situs resmi AU : <https://www.au.int/web/en/organs/psc>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

Hanson, Stephani. *“The African Union”*. Diakses dari situs : <http://www.cfr.org/africa-sub-saharan/african-union/p11616>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.10 WIB.

HiruyWubie, ZelalemTsegaw. *“Historical Background Of The African Union”*. Diakses dari situs:

<http://www.abysinnialaw.com/study-online/item/377-historical-background-of-the-african-union>. Pada 15 November 2019 pukul 00.02 WIB.

Juba. “*Ekonomi Sudan Selatan jadi Korban Konflik Berkepanjangan*”. Diakses dari situs : <http://www.antaranews.com/berita/551068/ekonomi-sudan-selatan-jadikorban-konflik-berkepanjangan>. Pada 15 November 2019 pukul 00.02 WIB.

South Africa History Online. “*Organization of African Unity (OAU)*”. Diakses dari situs : <http://www.sahistory.org.za/topic/organisationafrican-unity-oau>. Diakses pada 15 November 2019 pukul 23.15 WIB.

Straus, Scott. “*Darfur and the Genocide Debate*”. Diakses dari situs : <https://www.foreignaffairs.com/articles/sudan/2005-01-01/darfur-andgenocide-debate>. Pada 10 Desember 2019 pukul 23.15 WIB.

UHRC. “*Genocide in Darfur*”. Diakses dari situs : <http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide-in-sudan>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

UNICEF, “*Darfur Overview*”. Diakses dari situs : [https://www.unicef.org/infobycountry/sudan\\_darfuroverview.html](https://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html). Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

“*About Sudan*”. Diakses dari situs :  
[http://www.sudanembassy.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3&Itemid=199](http://www.sudanembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=199). Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

“*Darfur*”. Diakses dari situs :  
<http://www.sudantribune.com/spip.php?mot12>. Pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 23.26 WIB.

“*Darfur History*”. Diakses dari situs :  
<http://www.amnestyusa.org/annualreport.php?id=ar&yr=2009&c=SDN>. Pada tanggal 17 September 2019 pukul 20.00 WIB.

“*History of The OAU and AU*”. Diakses dari situs :  
<https://dev.au.int/en/history/oauand-au>. Pada tanggal 17 September 2019 pukul 09.00 WIB.

“*History of The Sudan*”. Diakses dari situs resmi :  
[http://www.sudanembassy.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=32&Itemid=196](http://www.sudanembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=196). Pada tanggal 17 September 2019 pukul 09.00 WIB.

“*Organization of African Unity (1963-2000)*”. Diakses dari situs: <http://www.blackpast.org/gah/organization-african-unity-1963-2002>. Pada tanggal 15 November 2019 pukul 23.47 WIB.